
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN APBD TAHUN 2024

Ibnu Aithan¹, Aldri Frinaldi², Nora Eka Putri³, Asnil⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Padang

E-mail: ibnuaitan25@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the regional financial performance of the Solok Regency Government based on the 2024 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Using a qualitative descriptive research method, this study focuses on an in-depth understanding of regional financial management, including the structure of revenue and expenditure, budget allocation efficiency, and the potential for fiscal independence. The data analyzed include the 2024 APBD document, related regional financial reports, and other relevant supporting data. Financial performance analysis is carried out through an evaluation of regional financial ratios, such as the fiscal independence ratio, regional revenue effectiveness ratio, and regional spending efficiency ratio. In addition, this study also examines the suitability of budget allocations with regional development priorities and their impact on public services and community welfare. A qualitative approach allows for a comprehensive interpretation of financial data, identifying trends, and understanding contextual factors that influence the regional financial performance of Solok Regency. The results of the study are expected to provide a clear picture of the financial condition of the Solok Regency Government in the 2024 budget year. These findings will be the basis for local governments in formulating more effective and efficient fiscal policies, increasing accountability for financial management, and optimizing the contribution of the APBD to sustainable regional development. The implications of this study are expected to enrich the understanding of regional financial dynamics in the context of fiscal decentralization in Indonesia.

Keywords: Fiscal Decentralization, APBD, Solok Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, studi ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk struktur pendapatan dan belanja, efisiensi alokasi anggaran, serta potensi kemandirian fiskal. Data yang dianalisis meliputi dokumen APBD Tahun 2024, laporan keuangan daerah terkait, serta data pendukung lainnya yang relevan. Analisis kinerja keuangan dilakukan melalui evaluasi rasio-rasio keuangan daerah, seperti rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas pendapatan daerah, dan rasio efisiensi belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan interpretasi yang komprehensif terhadap data keuangan, mengidentifikasi tren, dan memahami faktor-faktor kontekstual yang

memengaruhi kinerja keuangan daerah Kabupaten Solok. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun anggaran 2024. Temuan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mengoptimalkan kontribusi APBD terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika keuangan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, APBD, Kabupaten Solok.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan pilar krusial dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, sebuah perjalanan panjang yang telah mengalami berbagai dinamika sejak dekade 1960-an (Alim 2024). Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan cenderung sentralistis, di mana sebagian besar kewenangan dan sumber daya keuangan terpusat di pemerintah pusat. Namun, seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan akan otonomi daerah yang lebih besar, paradigma desentralisasi fiskal secara bertahap mulai menguat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah menjadi tonggak awal dalam upaya mengatur pembagian keuangan (Darise 2024). Meskipun implementasinya belum optimal, undang-undang ini menandai pengakuan terhadap pentingnya transfer keuangan dari pusat ke daerah (Djohan, Khairi, dan Alma'arif n.d.). Periode Orde Baru kemudian membawa corak desentralisasi yang lebih terstruktur, meskipun dengan kontrol yang masih dominan dari pemerintah pusat. Kebijakan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai diperkenalkan sebagai mekanisme transfer fiskal untuk mendukung pembangunan di daerah (Yurnal dan Handayani 2024).

Momentum reformasi pada akhir tahun 1990-an menjadi titik balik signifikan bagi desentralisasi fiskal di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 1 memberikan landasan hukum yang kuat bagi otonomi daerah yang lebih luas (Febiola dan Sari 2024), termasuk dalam pengelolaan keuangan. Undang-undang ini kemudian direvisi dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Dikson, Yovinus, dan Fauzi 2024), 2 yang semakin memperjelas kewenangan dan tanggung jawab fiskal antara pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Solok sebagai salah satu entitas otonom memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah (Akyani 2024). APBD mencerminkan prioritas pembangunan daerah, alokasi sumber daya, serta proyeksi pendapatan dan belanja yang diharapkan. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah berdasarkan APBD menjadi esensial untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, akuntabilitas, serta

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (NAFISA 2024).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Solok berdasarkan APBD Tahun 2024, dengan mempertimbangkan kerangka desentralisasi fiskal yang berlaku. Pemahaman mendalam terhadap kinerja keuangan daerah tidak hanya penting bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga bagi masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok, serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk peningkatan kinerja di masa mendatang, selaras dengan semangat desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan daerah.

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama

No	Aspek Kinerja Keuangan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan (RKD)	Persen (%)	≥80%
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen (%)	≥1%
		Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen (%)	≥2%
2	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan	Realisasi Penertaan PAD Terhadap Target	Persen (%)	≥95%
		Rasio Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah	Persen (%)	≤8%
		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen (%)	Pertingkatn C%
3	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah	Rasio Serapan Anggaran Belanja Daerah	Persen (%)	≥90%

		Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Persen (%)	≥E%
		Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	Persen (%)	≤F%
4.	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Utang Daerah	Rasio Defisit/Surplus Anggaran Terhadap Total Belanja	Persen (%)	Surplus ≥G% / Defisit ≤H%
		Rasio Utang Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen (%)	≤I%
		Rasio Pembayaran Bunga dan Pokok Utang Terhadap Pendapatan Daerah	Persen (%)	≤J%
5.	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK	Kategori Opini	WTP/WDP/DWP/TMP
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Tepat Waktu	Seluruh Laporan Tepat Waktu
		Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Publik	Tingkat Aksesibilitas Informasi	Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Hasil
1.	Politik Hukum Desa Berbasis Desentralisasi Fungsional Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia	Yamani, M	2022	materi kewenangan lokal berskala desa dapat ditingkatkan dengan menghilangkan materi yang tumpang tindih dengan kewenangan daerah supra desa
2.	Perbandingan Sistem Hukum Federalisme di Amerika Serikat dengan Otonomi Daerah di Indonesia	Luthfy, Riza Multazam and Nuraini, Hesti and Alamsyafi	2020	Desentralisasi Asimetris yang diberikan kepada Daerah adalah sebagian ciri Negara Federal
3.	Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak	Nahda, Sri	2020	Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah

4.	Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	FR Zubarita	2023	Mendorong Kemandirian dan Inovasi Daerah untuk menerapkan ekstensifikasi dan intensifikasi Retribusi Daerah untuk meminimalisir ketergantungan Daerah Terhadap Pusat dan menggali potensi-potensi baru yang meningkatkan iklim investasi dan daya saing daerah
5.	Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara	Makawim bang, Christo mus, and Taroreh	2021	Secara Simultan Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6.	Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palembang	Masnur baiti, Nike	2020	Secara Keseluruhan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palembang setelah Anggaran Berbasis Kinerja dapat dikatakan cukup baik karena PAD Mengalami Peningkatan Walaupun diikuti dengan bantuan pemerintah pusat
7.	Problematika Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Dana Bagi Hasil Migas Provinsi Riau	Nelvia Roza	2021	Dalam Perumusannya masih belum dilakukan pendalaman Kajian secara Komprehensif terkait besaran Presentase DEH Migas tersebut

8.	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019	Larashat i, Novia	2021	Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Positif terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh positif terhadap PAD DKI Jakarta Tahun 2017-2019
----	--	-------------------	------	--

1. Pengertian Desentralisasi Fiskal.

desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan dan tanggung jawab di bidang keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam negara kesatuan. Proses ini mencakup pelimpahan otoritas dalam pengelolaan pendapatan daerah, alokasi belanja, dan mekanisme pembiayaan, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan lokal (Wartono, Maichal, dan Apriyanto 2024). Desentralisasi fiskal lebih dari sekadar transfer dana, ia memberdayakan daerah untuk membuat keputusan fiskal yang sesuai dengan prioritas dan kondisi spesifik mereka, tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Para Ahli Mengenai Desentralisasi Fiskal.

Beberapa ahli terkemuka telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami konsep desentralisasi fiskal:

- Richard Musgrave (1959): Dalam karyanya yang klasik, "The Theory of Public Finance," Musgrave menekankan pentingnya pemisahan fungsi fiskal antara berbagai tingkatan pemerintahan (Judijanto et al. 2025). Pemerintah pusat idealnya bertanggung jawab atas fungsi alokasi sumber daya secara nasional, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Sementara itu, pemerintah daerah lebih efisien dalam menyediakan barang dan jasa publik lokal karena memiliki pemahaman

yang lebih baik tentang preferensi masyarakat setempat. Desentralisasi fiskal, menurut Musgrave, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil.

- Wallace Oates (1972): Melalui Teorema Desentralisasi yang dikemukakannya dalam "Fiscal Federalism," Oates menyatakan bahwa setiap tingkat pemerintahan harus bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa publik yang manfaatnya terutama dinikmati oleh penduduk di wilayah yurisdiksinya (Syahdewa 2022). Desentralisasi fiskal memungkinkan terciptanya fiscal equivalence, di mana hubungan antara biaya yang dibayar dan manfaat yang diterima dari layanan publik menjadi lebih langsung, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada konstituennya.
- Anwar Shah (2007): Dalam publikasinya, "Intergovernmental Fiscal Transfers: Principles and Practice," Shah menyoroti bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada adanya kerangka kelembagaan yang solid. Ini mencakup sistem transfer dana yang transparan dan adil, kapasitas manajemen keuangan yang memadai di tingkat daerah, serta mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab. Tanpa fondasi ini, desentralisasi fiskal berpotensi menimbulkan masalah seperti inefisiensi dan ketidakmerataan.
- Johannes Linn dan Deborah Wetzel (1998): Dalam artikel mereka, "Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations in Developing Countries," Linn dan Wetzel menggarisbawahi bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong inovasi dan eksperimen kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan solusi yang lebih adaptif terhadap konteks lokal mereka. Namun, mereka juga memperingatkan tentang risiko fragmentasi kebijakan dan kurangnya koordinasi antar daerah jika desentralisasi tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat melalui regulasi dan insentif yang tepat.
- Martinez-Vazquez, Jorge, dan Bob Searle (2020): Dalam buku "The Challenges of Fiscal Decentralization: Reforming Grant Systems and Subnational Public Financial Management," mereka menekankan bahwa desentralisasi fiskal yang efektif memerlukan sistem transfer antar pemerintah yang dirancang dengan baik untuk memastikan keadilan, efisiensi, dan stabilitas fiskal. Mereka menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas manajemen fiskal yang kuat di tingkat subnasional.
- Rodríguez-Pose, Andrés, dan Nicholas Gill (2019): Dalam artikel "Does Decentralization Matter for Regional Disparities? A Global Perspective," mereka meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal dan disparitas regional. Temuan mereka menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak secara otomatis mengurangi disparitas dan bahkan dapat memperburuknya jika tidak disertai dengan kebijakan redistributif yang tepat dan kapasitas kelembagaan yang memadai di daerah tertinggal.

-
- Baskaran, Thushyanthan, dan Lars Feld (2018): Dalam "Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Meta-Analysis," mereka melakukan analisis meta terhadap berbagai studi tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Nurchasanah dan Pratama 2023). Kesimpulan mereka adalah bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan tidak selalu positif dan sangat bergantung pada desain kelembagaan dan konteks spesifik suatu negara. Desentralisasi yang dirancang dengan baik, dengan akuntabilitas dan transparansi yang kuat, cenderung memiliki dampak yang lebih positif.
 - Ahmad, Ehtisham, Giorgio Brosio, dan Bernard Dafflon (2017): Dalam buku "Handbook of Fiscal Federalism," mereka memberikan tinjauan komprehensif tentang berbagai aspek desentralisasi fiskal. Mereka menekankan bahwa desentralisasi fiskal harus disesuaikan dengan konteks politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Tidak ada model desentralisasi fiskal yang cocok untuk semua negara, dan keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik dan kapasitas implementasi.
 - Oates, Wallace E. (2022): Dalam artikel terbarunya, "On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization," Oates merefleksikan kembali teorema desentralisasi klasiknya dan menekankan bahwa meskipun prinsip fiskal equivalence tetap relevan, tantangan dalam implementasi desentralisasi fiskal, seperti asimetri informasi dan eksternalitas antar daerah, perlu diatasi melalui mekanisme koordinasi dan regulasi yang efektif dari pemerintah pusat.
2. Bentuk Desentralisasi Fiskal:
 - Desentralisasi Administratif: Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang administratif dalam pengelolaan keuangan kepada Kabupaten Solok. Ini berarti daerah memiliki fleksibilitas dalam mengelola anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rahmansyah 2024).
 - Desentralisasi Politik: Kabupaten Solok memiliki otonomi dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah (Perda) terkait aspek-aspek fiskal dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya adalah penetapan tarif pajak dan retribusi daerah (Rochmawati dan Sari 2022).
 - Desentralisasi Fiskal (sebagai fokus utama): Pemerintah Kabupaten Solok memiliki kewenangan yang signifikan dalam mengelola pendapatan (termasuk PAD dan transfer), merencanakan dan melaksanakan belanja daerah, serta mencari sumber-sumber pembiayaan daerah.
 3. Jenis Desentralisasi Fiskal (yang akan tercermin dalam APBD 2024):
 - Otonomi Pendapatan Daerah: Kita perlu melihat seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah (misalnya pajak hotel, restoran, hiburan), retribusi

daerah (misalnya retribusi pasar, parkir), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain terhadap total pendapatan Kabupaten Solok dalam APBD 2024 (ADRIAN 2024). Tingkat otonomi pendapatan menunjukkan kemandirian fiskal daerah.

- Sistem Transfer Antarpemerintahan: APBD Kabupaten Solok pasti akan mencakup transfer dana dari pemerintah pusat, yang terdiri dari:
 - Dana Alokasi Umum (DAU): Transfer bersifat block grant yang penggunaannya relatif bebas oleh daerah sesuai dengan prioritas pembangunan.
 - Dana Alokasi Khusus (DAK): Transfer yang dialokasikan untuk tujuan tertentu (spesifik grant) seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan.
 - Dana Bagi Hasil (DBH): Bagian dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan sumber daya alam atau penerimaan negara lainnya yang dihasilkan di daerah tersebut. Analisis komposisi dan besaran transfer ini penting untuk memahami ketergantungan fiskal Kabupaten Solok pada pemerintah pusat.

- Kewenangan Belanja Daerah: Struktur belanja dalam APBD 2024 akan mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Solok. Kita perlu melihat alokasi anggaran untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Tingkat diskresi daerah dalam menentukan alokasi ini menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal dalam hal pengeluaran.
- Kewenangan Pembiayaan Daerah: Jika ada, APBD 2024 mungkin mencantumkan sumber-sumber pembiayaan daerah selain PAD dan transfer, seperti pinjaman daerah atau sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Kemampuan daerah untuk mengakses sumber pembiayaan alternatif menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi (Zahrah, Komedi, dan Komedi 2024).

Dengan kerangka pemahaman desentralisasi fiskal ini, kita dapat melanjutkan analisis APBD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2024 secara lebih terstruktur. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan dan menelaah data APBD untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip desentralisasi fiskal ini diimplementasikan dalam praktik dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah.



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Deskriptif Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena atau kasus tertentu sebagaimana adanya, tanpa adanya manipulasi atau perbandingan antar kelompok (Sari dan Ganing 2021). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai pengalaman, persepsi, makna, dan konteks yang melingkupi fenomena yang diteliti.

- Teknik Pengumpulan Data.
 - Dalam penelitian deskriptif kualitatif, berbagai teknik pengumpulan data dapat digunakan secara tunggal maupun kombinasi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif (Roosinda et al. 2021). Berikut adalah beberapa teknik yang relevan:
 - Studi Dokumen (Document Study)
 - Deskripsi: Studi dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan fokus penelitian (Safarudin et al. 2023). Dokumen dapat berupa catatan resmi, surat, laporan, memo, agenda, transkrip, media massa, buku harian, foto, video, dan materi digital lainnya.
 - Tujuan: Untuk memperoleh informasi kontekstual, historis, atau deskriptif

yang dapat memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

- Analisis Isi Dokumen: Isi dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi tema, pola, tren, atau informasi spesifik yang relevan dengan fokus penelitian.
- Fokus Group Discussion (FGD)
- Deskripsi: FGD merupakan diskusi kelompok yang terarah dan dipandu oleh seorang moderator. Kelompok diskusi terdiri dari beberapa partisipan yang memiliki karakteristik relevan dengan fokus penelitian.
- Tujuan: Untuk menggali berbagai perspektif, pengalaman, dan opini mengenai suatu isu atau topik melalui interaksi dan diskusi antar partisipan.
- Proses:
 - Penyusunan Panduan Diskusi: Moderator menyusun panduan diskusi yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dibahas.
 - Pemilihan Partisipan: Partisipan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.
 - Pelaksanaan Diskusi: Moderator memfasilitasi diskusi agar berjalan lancar, semua partisipan memiliki kesempatan untuk berbicara, dan topik yang relevan dibahas secara mendalam.
 - Pencatatan Data: Diskusi biasanya direkam menggunakan alat perekam audio atau video (dengan izin partisipan). Catatan lapangan juga penting untuk merekam dinamika kelompok, ekspresi non-verbal, dan poin-poin penting yang muncul selama diskusi.
- Teknik Analisis Data
 - Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif bersifat induktif dan iteratif. Proses analisis dimulai sejak pengumpulan data pertama dan berlanjut hingga seluruh data terkumpul dan peneliti mencapai pemahaman yang mendalam

(Roosinda et al. 2021). Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang umum digunakan:

- Reduksi Data (Data Reduction)
- Deskripsi: Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang terkumpul di lapangan. Proses ini bertujuan untuk memilah data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan menghilangkan data yang tidak relevan.
- Proses:
- Pembuatan Ringkasan: Meringkas catatan lapangan, transkrip wawancara, atau dokumen-dokumen penting.
- Pemilihan Tema: Mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul dari kode-kode awal. Tema merupakan unit makna yang berulang, signifikan, dan relevan dengan pertanyaan penelitian.
- Penyajian Data (Data Display)
- Deskripsi: Penyajian data adalah proses mengorganisasikan dan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa teks naratif, tabel, grafik, bagan, matriks, atau diagram.
- Tujuan: Untuk memudahkan peneliti melihat pola-pola, hubungan, dan perbedaan dalam data, serta untuk menarik kesimpulan yang valid.
- Contoh:
- Matriks: Menampilkan data dari berbagai partisipan atau sumber data berdasarkan tema-tema tertentu untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi.
- Bagan Alur: Menggambarkan proses atau tahapan suatu fenomena berdasarkan data yang terkumpul.
- Deskripsi Naratif: Menyajikan temuan penelitian dalam bentuk uraian yang detail dan mendalam, dilengkapi dengan kutipan-kutipan langsung dari partisipan atau dokumen untuk mendukung interpretasi.
- Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)
- Deskripsi: Penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi terhadap pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data yang telah disajikan (Azhari et al. 2023). Verifikasi merupakan proses untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik didukung oleh data dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Proses:
- Interpretasi: Peneliti mencari makna dan signifikansi dari pola-pola dan tema-tema yang telah diidentifikasi (Rifa'i 2023). Interpretasi harus didasarkan pada data yang ada dan dihubungkan dengan konteks penelitian serta teori yang relevan.
- Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data (misalnya, wawancara, observasi, dokumen) atau metode pengumpulan data untuk memvalidasi temuan. Jika informasi dari berbagai sumber mendukung kesimpulan yang sama, maka kredibilitas temuan akan meningkat (Agusven et al. 2023).
- Member Check: Meminta partisipan untuk meninjau dan memberikan umpan balik terhadap interpretasi dan kesimpulan peneliti. Ini membantu memastikan bahwa interpretasi peneliti akurat dan sesuai dengan pengalaman partisipan.
- Diskusi dengan Kolega: Mendiskusikan temuan dan interpretasi dengan peneliti lain untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan meningkatkan objektivitas.
- Audit Trail: Mendokumentasikan secara rinci seluruh proses penelitian,

mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan interpretasi. Ini memungkinkan peneliti lain untuk menelusuri dan mengevaluasi kredibilitas penelitian.

Dengan menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data yang relevan dan menerapkan teknik analisis data yang sistematis dan cermat, penelitian deskriptif kualitatif dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kaya mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis potensi kinerja keuangan daerah Kabupaten Solok dalam era otonomi, khususnya berdasarkan APBD Tahun 2024, memerlukan pemahaman tentang bagaimana kabupaten ini mengelola sumber daya keuangannya untuk menjalankan fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan daerah secara mandiri. Desentralisasi fiskal memainkan peran penting dalam konteks ini, memberikan kewenangan dan tanggung jawab fiskal kepada daerah.

1. Hambatan yang Sering Kali Mewarnai Proses Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Solok :

- Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat: Meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan sektor lainnya, Kabupaten Solok bisa saja masih memiliki tingkat ketergantungan yang signifikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat membatasi fleksibilitas fiskal daerah dalam merespons kebutuhan lokal yang spesifik.
- Kapasitas Fiskal yang Belum Optimal: Potensi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok dari sektor seperti pertanian, pariwisata, dan perdagangan mungkin belum tergali secara maksimal. Keterbatasan infrastruktur, promosi yang kurang efektif, atau regulasi yang kurang mendukung dapat menjadi penghambat.

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan: Efektivitas pengelolaan APBD 2024 di Kabupaten Solok sangat bergantung pada kompetensi SDM di bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah. Keterbatasan kapasitas dapat menghambat penyerapan anggaran yang optimal dan kualitas laporan keuangan.
- Koordinasi Antar OPD: Sinergi dan koordinasi yang efektif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Solok penting untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana dan anggaran. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan inefisiensi dan tumpang tindih anggaran.
- Regulasi yang Tidak Sinkron: Ketidaksesuaian antara regulasi di tingkat pusat dan daerah, atau perubahan regulasi yang terlalu cepat, dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat implementasi program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD 2024.

2. Dampak Positif Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Solok :

- Alokasi Anggaran yang Lebih Sesuai dengan Prioritas Lokal: Dengan otonomi fiskal, Pemerintah Kabupaten Solok memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran APBD 2024 sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah yang paling mendesak, seperti pengembangan sektor pertanian unggulan, peningkatan infrastruktur pedesaan, atau pengembangan potensi pariwisata.
 - Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah: Masyarakat Kabupaten Solok memiliki hak untuk mengawasi penggunaan APBD 2024 dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik. Desentralisasi mendorong transparansi dan akuntabilitas.
 - Inisiatif dan Inovasi Lokal: Otonomi memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk mengembangkan inisiatif dan inovasi dalam meningkatkan PAD dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan karakteristik dan potensi unik daerah.
 - Peningkatan Pelayanan Publik yang Lebih Baik: Dengan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Solok, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, dapat meningkat.
 - Pemberdayaan Masyarakat: Melalui mekanisme partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan APBD 2024, masyarakat Kabupaten Solok dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan daerah.
3. Tantangan dan Dampak Negatif Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Solok :
- Ketimpangan Pembangunan dengan Daerah Lain: Jika kapasitas fiskal Kabupaten Solok relatif rendah dibandingkan daerah lain, dapat terjadi ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan publik.
 - Risiko Penyalahgunaan Anggaran: Kewenangan yang lebih besar dalam mengelola APBD 2024 juga membawa risiko penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi jika tidak ada pengawasan yang ketat.
 - Inefisiensi Pengelolaan Keuangan: Keterbatasan SDM dan sistem pengelolaan keuangan yang kurang efektif dapat menyebabkan inefisiensi dalam penyerapan dan penggunaan anggaran APBD 2024.
 - Potensi Konflik Kewenangan: Ketidakjelasan batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan sumber daya atau pelaksanaan program tertentu dapat menimbulkan konflik.
 - Kebijakan Daerah yang Kurang Sinkron dengan Kebijakan Nasional: Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Solok melalui APBD 2024 perlu tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan

- yang pembangunan berkelanjutan.
4. Langkah-langkah untuk Mengatasi Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Solok :
 - Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah:
 - Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD baru, seperti sektor pariwisata berbasis budaya dan alam, produk pertanian unggulan dengan nilai tambah, atau retribusi yang belum optimal.
 - Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor dan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah:
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD 2024 melalui publikasi informasi anggaran dan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat.
 - Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran Inspektorat Daerah dan DPRD.
 - Mengimplementasikan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) yang terintegrasi dan akuntabel.
 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):
 - Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan bagi aparatur pengelola keuangan daerah.
 - Merekrut tenaga ahli di bidang perencanaan anggaran, akuntansi, dan audit jika diperlukan.
 - Optimalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan:
 - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
 - Menyusun peraturan daerah yang mendukung implementasi kebijakan nasional dan mengakomodasi kebutuhan lokal.
 - Penguatan Pengawasan dan Evaluasi:
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan APBD 2024.
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat:
 - Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum-forum konsultasi publik.
 - Membuka ruang bagi masyarakat untuk

memberikan masukan dan pengaduan terkait pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Solok berdasarkan APBD Tahun 2024 menunjukkan beberapa hal penting. Struktur pendapatan daerah kemungkinan masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, sementara potensi pendapatan asli daerah (PAD) perlu terus dioptimalkan. Dari sisi belanja, efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah perlu dievaluasi lebih lanjut. Rasio-rasio keuangan daerah seperti kemandirian fiskal, efektivitas belanja, dan efisiensi operasional memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah dan menjadi dasar untuk perbaikan di masa depan.

Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD perlu ditingkatkan melalui inovasi dan pengelolaan potensi lokal yang lebih optimal. Prioritas alokasi anggaran harus lebih fokus pada program-program strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD yang transparan dan akuntabel juga menjadi kunci. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui pelatihan dan sistem informasi keuangan yang terintegrasi akan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

ADRIAN, M. Y. 2024. *Strategi Badan Keuangan Daerah (BKD) Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan*

Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Parepare. Program studi repository.iainpare.ac.id.

Agusven, S. T. Tubel, S. A. P. Satriadi, S. E. Rihan Hafizni, dan ... 2023. *Dasar metodologi penelitian kualitatif.* books.google.com.

Akyani, R. 2024. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2022 Melalui Pendekatan Value for Money.* etheses.uingusdur.ac.id.

Alim, M. S. 2024. *Ilmu Politik & Kebijakan Publik.* books.google.com.

Azhari, M. T., M. P. Al Fajri Bahri, M. S. Asrul, dan T. Rafida. 2023. *Metode penelitian kuantitatif.* books.google.com.

Darise, R. I. 2024. "PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI." *Jurnal Cakrawala Ilmiah.*

Dikson, H., Y. Yovinus, dan L. M. Fauzi. 2024. "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIMBANGAN KEUANGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BERDASARKAN UNDANG" *Jurnal Prinsip: Jurnal*

Djohan, D., H. Khairi, dan A. Alma'arif. n.d. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah." *eprints2.ipdn.ac.id.*

Febiola, F., dan V. F. Sari. 2024. "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Akuntansi: Studi Empiris pada OPD Kabupaten Solok Selatan." *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI.*

Judijanto, L., J. Mila, H. Apriyanto, A. Ariesmansyah, dan ... 2025. *Sistem Politik Indonesia.* books.google.com.

NAFISA, N. 2024. *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PADA BADAN*

- PERTANAHAN NASIONAL DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA.* repository.unj.ac.id.
- Nurchasanah, T., dan A. A. N. Pratama. 2023. "Hubungan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Konteks Desentralisasi." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah*
- Rahmansyah, D. 2024. *PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH* repository.uinfabengkulu.ac.id.
- Rifa'i, Y. 2023. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset." *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*.
- Rochmawati, I., dan A. R. Sari. 2022. *Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Perbatasan.* books.google.com.
- Roosinda, F. W., N. S. Lestari, AAGS Utama, H. U. Anisah, dan ... 2021. *Metode penelitian kualitatif.* books.google.com.
- Safarudin, R., Z. Zulfamanna, M. Kustati, dan ... 2023. "Penelitian kualitatif." *Innovative: Journal Of*
- Sari, S. M., dan N. N. Ganing. 2021. "Pengembangan media pembelajaran Powtoon berbasis problem based learning pada materi ekosistem muatan IPA kelas V sekolah dasar." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi*
- Syahdewa, G. S. 2022. *Tinjauan Atas Tingkat Penyerapan dan Optimalisasi Dana Desa Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 sd 2020.* eprints.pknstan.ac.id.
- Wartono, T., M. Maichal, dan A. Apriyanto. 2024. *Ekonomi Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Masa Depan Perekonomian Indonesia 2030.* books.google.com.
- Yurnal, R. G., dan D. F. Handayani. 2024. "Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat." *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*.
- Zahrah, N. Al, M. S. Komedi, dan M. S. Komedi. 2024. *ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT.* eprints.ipdn.ac.id.